

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengawal dan memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang tertera pada pembukaan UUD 1945, pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum artinya mewujudkan masyarakat yang adil atau tidak timpang. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat merupakan akar berbagai permasalahan sosial dan dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu pengentasan ketimpangan perlu menjadi fokus pemerintah.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut serta dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dalam poin ke 10 dari SDGs menargetkan pada 2030 adanya pertumbuhan 40 persen pendapatan penduduk termiskin. Tujuan dari target ini adalah untuk menurunkan ketimpangan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam misinya membangun Gorontalo juga mencantumkan program pengentasan ketimpangan. Hal ini tertera dalam misi pemerintah yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

lebih merata dan adil. Misi ini dijalankan pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera.

Mengentaskan ketimpangan merupakan pekerjaan yang sulit bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran pada kelompok miskin dan dapat menaikkan taraf hidup penduduk miskin secara berkelanjutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu penyebab ketimpangan yang tinggi di saat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Tingginya ketimpangan yang bersamaan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil *output* di wilayah Gorontalo tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini biasa terjadi di wilayah yang sedang berkembang,

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai berbagai wilayah tidak lantas menjamin terciptanya pemerataan pendapatan antar individu dan wilayah. Bahkan seringkali pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan adanya ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan yang paling jelas terlihat adalah pada aspek pendapatan yang menimbulkan golongan kaya dan miskin, aspek spasial yang menimbulkan adanya wilayah maju dan tertinggal serta aspek sektoral yang menimbulkan adanya sektor unggulan dan non-unggulan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antarwilayah adalah, yang pertama konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Kedua, alokasi investasi yang tidak merata sebagai akibat dari timpangnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ketiga

adalah tingkat mobilitas faktor produksi (tenaga kerja, modal) yang lemah antarwilayah. Keempat adalah perbedaan sumber daya alam. Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alamnya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih maju dibandingkan daerah yang miskin akan sumber daya alam (Murdiono, 2014)

Perbaikan tingkat kemiskinan Gorontalo pada periode September 2019, tidak diiringi dengan perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo hingga September 2019 mengalami penurunan menjadi sebanyak 184,71 ribu jiwa atau sebesar 15,31% dari jumlah penduduk. Namun demikian rasio gini Gorontalo pada September 2019 tercatat sebesar 0,410 atau sedikit meningkat dari 0,40 di Maret 2018. Peningkatan tingkat ketimpangan tersebut mencerminkan kualitas pembangunan yang belum merata.

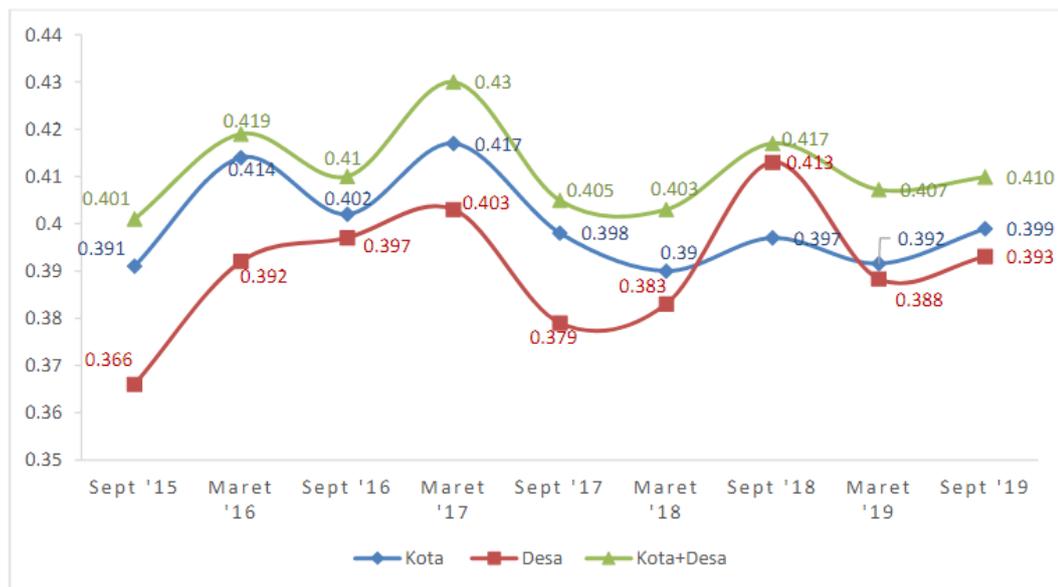
Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode September 2015-2019 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,410. Angka ini meningkat sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2019 dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2018.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2019 adalah sebesar 0,399 mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan meningkat sebesar 0,002 poin

dari September 2018 yang sebesar 0,397. Untuk daerah perdesaan kondisi September 2019, Gini Rasio adalah sebesar 0,393 mengalami peningkatan 0,005 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,388 serta menurun 0,02 poin dibanding September 2018 yang sebesar 0,413 (BPS Gorontalo, 2020).

Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Gorontalo terlihat pada grafik berikut ini

:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

### Gambar 1.1 Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Gorontalo 2015-2019

Bila dilihat Gini rasio Provinsi Gorontalo cukup tinggi dikarenakan gini rasio  $> 0,4$  sesuai dengan kriteria gini rasio yang lebih dari 0,4 maka gini rasio cukup tinggi. Bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi gini rasio Provinsi Gorontalo masih berada di atas rata-rata gini rasio di Sulawesi. Hal ini terlihat dari data dibawah :

**Tabel 1.2**  
**Gini Rasio Provinsi di Sulawesi 2015-2019**

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SULAWESI UTARA	0.366	0.379	0.394	0.372	0.367
SULAWESI TENGAH	0.370	0.347	0.345	0.317	0.327
SULAWESI SELATAN	0.404	0.400	0.429	0.388	0.389
SULAWESI TENGARA	0.381	0.388	0.404	0.392	0.399
GORONTALO	0.401	0.410	0.405	0.417	0.407
SULAWESI BARAT	0.362	0.371	0.339	0.366	0.365

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020*

Tidak meratanya sumber daya manusia membuat tingkat ketimpangan meningkat, di mana pemilik modal dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang masih berada di sektor ekonomi tradisional dan pekerja dengan keterampilan rendah. Hal ini juga menjelaskan mengapa ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, karena pergeseran ekonomi tradisional menuju ekonomi modern lebih cepat terjadi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Lalu

semakin lama, pada titik ambang batas tertentu hubungan ketimpangan dan pertumbuhan akan negatif, artinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan menurunnya ketimpangan.

Pengentasan ketimpangan yang dapat dilakukan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yaitu salah satunya melalui belanja daerah. Pemerintah menyalurkan pendapatan daerah berupa pendapatan dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah, dan pajak melalui pembelanjaan yang dilakukan. Dalam melakukan pembelanjaan daerah baiknya pemerintah memfokuskan pada belanja-belanja yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin. Belanja daerah juga diperuntukkan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja dengan keterampilan rendah, sehingga dengan meningkatnya kemampuan pekerja diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Ketimpangan yang diukur oleh gini rasio masih terbatas pada ketimpangan di level provinsi sehingga belum melihat ketimpangan yang ada di Kabupaten/kota. Maka dari itu dalam penelitian ini akan menghitung ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota menggunakan indeks Qiao sehingga akan menjadi pembeda dari penelitian pada umumnya. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang **“Analisis Ruang Fiskal dan Ketimpangan Di Provinsi Gorontalo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi ketimpangan di kabupaten/kota menggunakan Indeks Qiao ?

2. Bagaimana kondisi ruang fiskal yang terjadi pada anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh ruang fiskal terhadap ketimpangan kabupaten/kota di provinsi Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui kondisi ketimpangan kabupaten/kota di provinsi gorontalo?
2. Untuk mengetahui kondisi ruang fiskal anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo?
3. Untuk mengetahui pengaruh ruang fiskal terhadap ketimpangan di Provinsi Gorontalo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan yaitu menganalisis ruang fiskal dan ketimpangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk masalah ketimpangan.

b. Bagi peneliti

Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama sekaligus sebagai wahana untuk mengaplikasikan pemahaman penulis tentang teori-teori yang didapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas